

**EVALUASI PERAN PARTAI POLITIK GOLONGAN KARYA
(GOLKAR) DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI
KUTACANE KABUPATEN ACEH TENGGARA
PADA TAHUN 2017
(Studi Kecamatan Babusallam dan Kecamatan Lawe Bulan
Kabupaten Aceh Tenggara)**

Skripsi

OLEH:

**MUHAMAD RAEZA AL FATAH
15.851.0007**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan Penulisan Karya Ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA

2/10/19

**EVALUASI PERAN PARTAI POLITIK GOLONGAN KARYA
(GOLKAR) DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI
KUTACANE KABUPATEN ACEH TENGGARA
PADA TAHUN 2017
(Studi Kecamatan Babusallam dan Kecamatan Lawe Bulan
Kabupaten Aceh Tenggara)**

Skripsi

OLEH:

**MUHAMAD RAEZA AL FATAH
15.851.0007**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan Penulisan Karya Ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA

2/10/19

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Evaluasi Peran Partai Politik Golongan Karya (GOLKAR)
Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kutacane Kabupaten
Aceh Tenggara pada tahun 2017 (Studi Kecamatan
Babusallam dan Kecamatan Lawe Bulan)

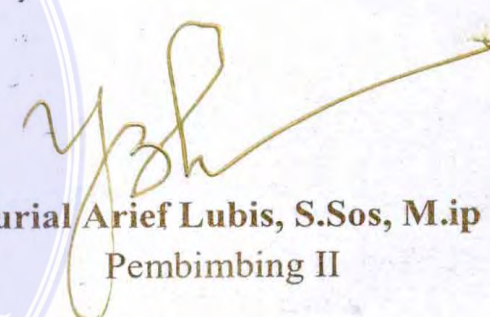
Nama : MUHAMAD RAEZA AL FATAH

NPM : 158510007

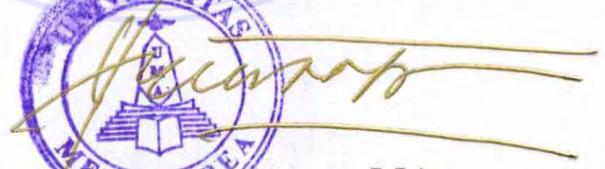
Bidang : Ilmu Pemerintahan

Disetujui Oleh
Dosen Pembimbing


Dr. Abdul Kadir, SH, M.Si
Pembimbing I


Yurial Arief Lubis, S.Sos, M.ip
Pembimbing II

Mengetahui :



Dr. Hari Kusnanto, MA
Dekan

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian – bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi – sanksi yang lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, Juni 2019



Muhamad Raeza Al-Fatah

158510007

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhamad Raeza Al Fatah
NPM : 158510007
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul : Evaluasi Peran Partai Politik Golongan Karya (GOLKAR) dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara pada tahun 2017 (Studi di Kecamatan Babusalam dan Kecamatan Lawe Bulan).

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada Tanggal : 30 Juni 2019
Yang Menyatakan

Muhamad Raeza Al Fatah

ABSTRACT

Evaluation of the Role of the Working Group of Political Parties (GOLKAR) in the Election of Regional Heads in Kutacane, Southeast Aceh District in 2017 (Study in Babusalam and Lawe Bulan Districts) ”

This study aims to determine how the evaluation of the role of the Working Group Political Party (GOLKAR) in the Election of Regional Heads in Kutacane Southeast Aceh Regency in 2017 (Study in Babusalam and Lawe Bulan Districts), here will evaluate the Role of the Group of Political Party (GOLKAR) in the Election of Regional Heads in Kutacane, Southeast Aceh District in 2017 (Case Study in the previous Babusalam and Lawe Bulan Districts). Where many indicators can measure the role of political parties by looking at several indicators to determine the success of performance, namely expectations about roles (expectation), norms (norms), manifestations of behavior in roles (performance), evaluation (evaluation) and sanctions (sanction), problems that faced is the readiness of human resources to be tested by evaluating its role, in this study using a qualitative descriptive method, the location of the study was conducted at the GOLKAR Party office in the District of Babusalam and Lawe Bulan District of Southeast Aceh Regency, data collection techniques were interviews, observation and documentation, can It was concluded that the Evaluation of the Role of the Functional Group (GOLKAR) Political Party in the Election of Regional Heads in Kutacane in Southeast Aceh District in 2017 (Case Study in Babusalam and Lawe Bulan Districts) was not good enough.

Keywords: *Evaluation, Role of Political Parties and Election of Regional Heads.*

ABSTRAK

Evaluasi Peran Partai Politik Golongan Karya (GOLKAR) dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara pada tahun 2017 (Studi di Kecamatan Babusalam dan Kecamatan Lawe Bulan)”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Evaluasi Peran Partai Politik Golongan Karya (GOLKAR) dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara pada tahun 2017 (Studi di Kecamatan Babusalam dan Kecamatan Lawe Bulan),disini akan mengevaluasi Peran Partai Politik Golongan Karya (GOLKAR) dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara pada tahun 2017 (Studi Kasus di Kecamatan Babusalam dan Kecamatan Lawe Bulan) yang lalu. Dimana banyak indikator yang dapat mengukur Peran Partai Politik Dengan melihat beberapa indikator untuk menentukan keberhasilan kinerja yaitu Harapan tentang peran (*expectation*), Norma (*norm*), Wujud perilaku dalam peran (*performance*), Penilaian (*evaluation*) dan sanksi (*sanction*), masalah yang dihadapi merupakan kesiapan sumber daya manusia yang akan diuji dengan mengevaluasi Perannya, di Penelitian ini menggunakan metode deksriptif kualitatif, lokasi penelitian dilakukan di kantor Partai GOLKAR di Kecamatan Babusalam dan Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara, teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa Evaluasi Peran Partai Politik Golongan Karya (GOLKAR) dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara pada tahun 2017 (Studi Kasus di Kecamatan Babusalam dan Kecamatan Lawe Bulan) Kurang baik.

Kata kunci: Evaluasi, Peran Partai Politik dan Pemilihan Kepala Daerah.

DAFTAR ISI

ABSTRAK		
KATA PENGANTAR		
DAFTAR ISI		
DAFTAR GAMBAR		

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang		1
1.2 Fokus Penelitian		5
1.3 Rumusan Masalah		5
1.4 Tujuan penelitian		5
1.5 Kegunaan Penelitian		6

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Evaluasi Peran		7
2.1.1 Pengertian Evaluasi		7
2.2 Peran		8
2.2.1 Pengertian Peran		8
2.2.2 Karakteristik Peran		19
2.3 Defenisi Partai Politik		27

2.3.1 Peran Partai Politik	29
2.3.2 Fungsi Partai Politik	34
2.3.2.1 Komunikasi Politik	34
2.3.2.2 Sosialisasi Politik	35
2.3.2.3 Rekrutmen Politik	36
2.3.2.4 Pengatur Konflik Politik	37
2.4 Pemilihan Kepala Daerah	38
2.5 Kerangka Pemikiran	44
2.6 Penelitian Relevan	47
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	49
3.2 Lokasi Penelitian	50
3.3 Informan Penelitian	50
3.4 Teknik Pengumpulan Data	50
3.5 Teknik Analisis Data	51
3.6 Uji Kredibilitas Data	52
3.7 Keabsahan Data	55

BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Sejarah Partai Politik Golongan Karya (GOLKAR)	57
4.2 Tugas Pokok dan Fungsi Partai Politik Golongan Karya (GOLKAR)	
Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara	60
4.3 Struktur Partai Politik Golongan Karya (GOLKAR)	
Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara	62
4.4 Evaluasi Peran Partai Politik Golongan Karya (GOLKAR).....	63
4.4.1 Harapan tentang peran (<i>expectation</i>)	63
4.4.2 Norma (<i>norm</i>).....	66
4.4.3 Wujud perilaku dalam peran (<i>performance</i>)	68
4.4.4. Penilaian (<i>evaluation</i>) dan sanksi (<i>sanction</i>).....	70

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	73
5.2 Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, atas segala limpahan rahmad dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Skripsi yang berjudul **“Evaluasi Peran Partai Politik Golongan Karya (GOLKAR) dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara pada tahun 2017 (Studi di Kecamatan Babusalam dan Kecamatan Lawe Bulan)”** disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area..

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa dukungan dari berbagai pihak skripsi ini tidak akan terselesaikan. Penghargaan yang tinggi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada kedua orangtua tercinta, Ayah saya dan Ibu saya yang telah melahirkan dan membesarkan serta mendidik penulis dengan penuh kasih sayang dan kesabaran, inilah yang dapat saya berikan kepada kalian sebagai tanda ucapan terimakasih dan tanda bakti saya. Dalam penulisan ini penulis menyampaikan penghargaan yang tulus dan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini kepada :

1. Bapak Dr. Heri Kusmanto, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
2. Bapak Yurial Arief Lubis, S.sos, M.ip selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr.Abdul Kadir,SH.M.Si selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan masukan kepada penulis.

4. Bapak Yurial Arief Lubis, S.sos, M.ip selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan perbaikan serta masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh staff pengajar dan staff administrasi Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
6. Kepada teman-teman yang tak bias saya sebutkan satu-persatu, saya ucapkan terima kasih atas partisipasi dn kebersamaannya selama ini.
7. Terima kasih untuk semua pihak yang membantu penulis yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Penulis merasa bahwa dalam penulisan skripsi masih terdapat berbagai kekurangan dan keterbatasan, untuk itu penulis sangat mengharapkan masukan dan saran-saran yang sifatnya membangun demi perbaikan tulisan ini.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, harapan saya agar tulisan ini dapat berguna bagi pembacanya, dan akhir kata dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini.

Medan, Juni 2019

Muhamad Raeza Al Fatah

NPM: 15.851.0007

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Harus diakui bahwa ketika beberapa elemen kritis di negeri ini mendorong terjadinya reformasi untuk demokrasi, tidak banyak dari mereka yang membayangkan bahwa perubahan ini akan membawa akibat yang sangat penting pada peran partai politik. Walaupun secara umum berkembang kepercayaan bahwa demokrasi memerlukan sebuah infrastruktur politik baru, kebanyakan orang di negeri ini kurang berhasil mengembangkan perspektif baru yang memadai selain dari pemilihan umum yang bebas. Adalah jelas bahwa pemilihan umum yang bebas merupakan syarat penting dalam demokrasi. Sama pentingnya dengan itu tentu saja adalah membangun partai politik yang efektif

Percakapan untuk mendorong perubahan yang pada awalnya terjadi di kalangan yang relatif terbatas ini mendapatkan momentum yang penting ketika “reformasi” dipakai sebagai istilah yang dipercaya sebagai mewakili kehendak publik yang lebih luas untuk menuntut sebuah perubahan politik yang lebih mendasar. Dalam waktu yang relatif sangat cepat terjadi perubahan yang sangat penting: percakapan berubah menjadi sebuah gerakan yang lebih masif walaupun kurang terorganisasi, agenda reformasi berubah menjadi aksi jalanan menuntut perubahan, dan pada akhirnya wacana akademis berubah menjadi praktik yang dilembagakan.

Tahun 2005, untuk pertama kalinya Indonesia dengan sukses telah melaksanakan pemilihan presiden dan wakilnya secara langsung, Disusul

kemudian dengan pemilihan kepala daerah secara langsung (PILKADA). Menurut berbagai pihak rangkaian pemilu ini dinilai cukup adil dan bebas serta berjalan dengan rapi.

Dalam konteks pemilu tersebut di atas, parpol harus memenuhi tugas-tugasnya yang maha penting, antara lain: Mempersiapkan kandidat-kandidat terbaiknya di legislatif, mempromosikan program politik dan *platform* pemilunya, serta bersaing untuk mendapatkan mandat publik dan suara-suaranya. Tetapi di samping itu dalam jangka yang lebih panjang, parpol harus bisa menjadi perantara masyarakat dengan institusi pemerintahan. Oleh sebab itu, parpol harus terorganisir secara demokratis, memiliki akar yang kuat dalam masyarakat sehingga mampu mereka rnuen-larkan demokrasi kepada masyarakat.

Sama seperti parpol di negara-negara lain yang se-dang dalam proses transisi dan pemerintahan otoriter ke negara demokratis, kerap kali kita melihat adanya budaya non-demokratis di dalam parpol Indonesia. Pengalaman selama masa pemilu dan sesudahnya menunjukkan bahwa masih ada kebutuhan untuk mempromosikan demokrasi dengan menjelaskan peran dan fungsi parpol, bagaimana mereka mengatur dirinya sendiri.

Fenomena menarik dari penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Aceh Tenggara, kerja keras dari sebuah partai politik dalam menggalang dukungan massa, ternyata tidak begitu berpengaruh pada pemilih untuk menjatuhkan pilihannya. Dalam arti bekerjanya mesin partai tidak dapat menjamin menang atau kalah dari pasangan calon yang diusungannya. Akan tetapi kemenangan masing-masing pasangan calon dalam pilkada Kabupaten Aceh Tenggara lebih

ditentukan oleh *branding* pribadinya (kharismatik masing-masing pasangan calon) daripada dominasi partai yang mengusungnya.

Salah satu yang dicemaskan adalah terjadinya aliansi politik dan pelaku bisnis yang dike-mudian hari berdampak pada kebijakan publik yang diarahkan pada kebijakan sempit untuk kepentingan pengusaha atau kelompok. Jika hal tersebut terjadi maka apa yang dihasilkan oleh pilkada adalah hasil dari proses negosiasi kepentingan, dengan segala konsekuensi yang akan muncul.

Pemilihan kepala Daerah secara langsung selanjutnya diwujudkan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Menurut Undang-Undang, Nomor 32 tahun 2004, Kepala Daerah adalah Kepala Pemerintah Daerah yang dipilih secara demokratis. Pemilihan secara demokratis terhadap Kepala Daerah tersebut dilakukan oleh rakyat secara langsung, mengingat bahwa tugas dan wewenang DPRD.

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat yang per-syaratannya dan tata tata caranya ditetapkan dalam peraturan Perundang-undangan. Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat dicalonkan baik oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang mempunyai sejumlah kursi tertentu dalam DPRD dan atau memperoleh dukungan suara dalam pemilu legislatif dalam jumlah tertentu.

Evaluasi Peran Partai Politik pada dasarnya dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kadar profesionalisme serta seberapa tepat sebuah Partai telah menjalankan fungsinya. Penilaian Peran dimaksudkan untuk menilai dan mencari jenis perlakuan yang tepat sehingga sebuah Partai dapat berkembang lebih cepat

sesuai dengan harapan. Ketepatan Partai dalam menjalankan fungsinya akan sangat berpengaruh terhadap pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan..

Oleh karena itu, bagi Partai yang mendukung , maupun Partai Lawan, evaluasi Peran sangat berguna untuk menilai kuantitas, kualitas, efisiensi perubahan, motivasi para Kader serta melakukan pengawasan dan perbaikan. Kinerja Kader yang optimal sangat dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas dan menjaga kelangsungan hidup Partai ini, dengan terbentuknya motivasi yang kuat, maka akan dapat membuahkan hasil atau Peran yang baik sekaligus berkualitas dari pekerjaan yang dilaksanakannya.

Hal ini yang mendorong penulis untuk mengkaji dan meneliti Evaluasi Peran Partai Politik Golongan Karya (GOLKAR) dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara pada tahun 2017 (Studi di Kecamatan Babusalam dan Kecamatan Lawe Bulan), Oleh sebab itu dalam kesempatan ini penulis mengupayakan suatu kajian ilmiah dalam judul penelitian sebagai berikut

“Evaluasi Peran Partai Politik Golongan Karya (GOLKAR) dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara pada tahun 2017 (Studi di Kecamatan Babusalam dan Kecamatan Lawe Bulan)”.

1.2 Fokus Penelitian

Fokus awal penelitian ini sebagai jembatan peneliti menjaring data lapangan adalah sebagai berikut:

Bagaimana Evaluasi Peran Partai Politik Golongan Karya (GOLKAR) dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara pada tahun 2017 (Studi di Kecamatan Babusalam dan Kecamatan Lawe Bulan)?

1.3 Rumusan Masalah

Pertimbangan pemikiran dan latar belakang empirik tersebut dikaitkan dengan fokus penelitian, maka penelitian ini merumuskan masalah pokok bahwa hasil dari Evaluasi Peran Partai Politik Golongan Karya (GOLKAR) dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara pada tahun 2017 (Studi di Kecamatan Babusalam dan Kecamatan Lawe Bulan) sangat menjadi sorotan, secara spesifik rumusan masalah tersebut diturunkan dalam beberapa bentuk pertanyaan, sebagai berikut:

Bagaimana Evaluasi Peran Partai Politik Golongan Karya (GOLKAR) dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara pada tahun 2017 (Studi di Kecamatan Babusalam dan Kecamatan Lawe Bulan)?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

Mengevaluasi Bagaimana Peran Partai Politik Golongan Karya (GOLKAR) dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara pada tahun 2017 (Studi di Kecamatan Babusalam dan Kecamatan Lawe Bulan)?

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mempunyai kegunaan:

1. Aspek teoritis, hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu, khususnya ilmu Pemerintahan. Penggunaan konsep dan teori Peran Organisasi dalam hubungan dengan fenomena yang ada dimasyarakat, dapat menghasilkan konsep baru bagi pengembangan ilmu Pemerintahan
2. Aspek praktis, hasil penelitian ini kiranya dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah dalam pengimplementasi dan menjalankan kebijakan publik
3. Mengetahui Bagaimana Evaluasi Peran Partai Politik Golongan Karya (GOLKAR) dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara pada tahun 2017 (Studi di Kecamatan Babusalam dan Kecamatan Lawe Bulan) berjalan sesuai yang diinginkan atau tidak

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Evaluasi Peran

2.1.1 Pengertian Evaluasi

Pengertian evaluasi dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti penilaian; hasil. Menurut *Bryan & White* (1987), evaluasi adalah upaya untuk mendokumentasi dan melakukan penilaian tentang apa yang terjadi dan juga mengapa hal itu terjadi, evaluasi yang paling sederhana adalah mengumpulkan informasi tentang keadaan sebelum dan sesudah pelaksanaan suatu program/rencana.

Pengertian evaluasi menurut *Charles O. Jones* dalam *Aprilia* (2009) adalah “*evaluation is an activity which can contribute greatly to the understanding and improvement of policy development and implementation*” (evaluasi adalah kegiatan yang dapat menyumbangkan pengertian yang besar nilainya dan dapat pula membantu penyempurnaan pelaksanaan kebijakan beserta perkembangannya). Pengertian tersebut menjelaskan bahwa kegiatan evaluasi dapat mengetahui apakah pelaksanaan suatu program sudah sesuai dengan tujuan utama, yang selanjutnya kegiatan evaluasi tersebut dapat menjadi tolak ukur apakah suatu kebijakan atau kegiatan dapat dikatakan layak diteruskan, perlu diperbaiki atau dihentikan kegiatannya.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang evaluasi kinerja, Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.

Menurut Ernest R. Alexander dalam Aminudin (2007), metode evaluasi dapat diklasifikasikan menjadi lima yaitu :

- 1) *Before and after comparisons*, metode ini mengkaji suatu obyek penelitian dengan membandingkan antara kondisi sebelum dan kondisi sesudahnya.
- 2) *Actual versus planned performance comparisons*, metode ini mengkaji suatu obyek penelitian dengan membandingkan kondisi yang ada (*actual*) dengan ketetapan perencanaan yang ada (*planned*)
- 3) *Experintal (controlled) model*, metode yang mengkaji suatu obyek penelitian dengan melakukan percobaan yang terkendali untuk mengetahui kondisi yang diteliti.
- 4) *Quasi experimental models*, merupakan metode yang mengkaji suatu obyek penelitian dengan melakukan percobaan tanpa melakukan pengontrolan/pengendalian terhadap kondisi yang diteliti.
- 5) *Cost oriented models*, metode ini mengkaji suatu obyek penelitian yang hanya berdasarkan pada penilaian biaya terhadap suatu rencana.

2.2 Peran

2.2.1 Pengertian Peran

Definisi Peran Teori peran *Biddle dan Thomas* adalah sebuah teori yang digunakan dalam dunia sosiologi, psikologi dan antropologi yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Teori peran berbicara tentang istilah “peran” yang biasa digunakan dalam dunia teater, dimana seorang aktor dalam teater harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu.

Posisi seorang aktor dalam teater dinalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, dan keduanya memiliki kesamaan posisi. Peran diartikan pada karakterisasi yang disandang untuk dibawa oleh seorang aktor dalam sebuah pentas drama, yang dalam konteks sosial peran diartikan sebagai suatu fungsi yang dibawa oleh seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial. Peran seorang aktor adalah batasan yang dirancang oleh aktor lain, yang kebetulan sama-sama berada dalam satu penampilan/ unjuk peran (*role performance*).

Dari paparan di atas tersebut dapat disimpulkan bahwa teori peran adalah teori yang berbicara tentang posisi dan perilaku seseorang yang diharapkan dari padanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitannya dengan adanya orang-orang lain yang berhubungan dengan orang atau aktor tersebut. Pelaku peran menjadi sadar akan struktur sosial yang didudukinya, oleh karena itu seorang aktor berusaha untuk selalu nampak “mumpuni” dan dipersepsi oleh aktor lainnya sebagai “tak menyimpang” dari sistem harapan yang ada dalam masyarakat.

Aspek-aspek Peran *Biddle dan Thomas* membagi peristilahan dalam teori peran dalam empat golongan, yaitu:

1. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial
2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut
3. Kedudukan orang-orang dalam perilaku
4. Kaitan antara orang dan perilaku

Orang Yang Berperan Berbagai istilah tentang orang- orang dalam teori peran. Orang- orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial dapat dibagi dalam dua golongan sebagai berikut :

a. Aktor atau pelaku, yaitu orang yang sedang berperilaku menurut suatu peran tertentu.

b. Target (sasaran) atau orang lain, yaitu orang yang mempunyai hubungan dengan aktor dan perilakunya. Aktor maupun target bisa berupa individu ataupun kumpulan individu (kelompok). Hubungan antara kelompok dengan kelompok misalnya terjadi antara sebuah paduan suara (aktor) dan pendengar (target). Biasanya istilah aktor diganti dengan *person*, *ego*, atau *self*. Sedangkan target diganti dengan istilah *alter-ego*, *ego*, atau *non-self*. Dengan demikian dapat dilihat bahwa sebenarnya teori peran digunakan untuk menganalisis setiap hubungan antara dua orang atau banyak orang.

Menurut *Cooley dan Mead*, hubungan antara aktor dan target adalah untuk membentuk identitas aktor (*person*, *ego*, *self*) yang dalam hal ini dipengaruhi oleh penilaian atau sikap orang- orang lain (*target*) yang telah digeneralisasikan oleh aktor. *Secord dan Backman* berpendapat bahwa aktor menempati posisi pusat tersebut (*focal position*), sedangkan target menempati posisi padanan dari posisi pusat tersebut (*counter position*). Maka dapat dilihat bahwa, target dalam teori peran berperan sebagai pasangan (*partner*) bagi aktor.

Perilaku Dalam Peran *Biddle dan Thomas* membagi lima indikator tentang perilaku dalam kaitannya dengan peran sebagai berikut :

a. Harapan tentang peran (*expectation*) Harapan tentang peran adalah harapan- harapan orang lain tentang perilaku yang pantas, yang seharusnya ditunjukkan oleh seseorang yang mempunyai peran tertentu. Harapan tentang perilaku ini bisa berlaku umum, bisa merupakan harapan dari segolongan orang saja, dan bisa juga merupakan harapan dari satu orang tertentu.

b. Norma (*norm*) *Secord* dan *Backman* berpendapat bahwa, norma hanya merupakan salah satu bentuk harapan. *Secord* dan *Backman* membagi jenis- jenis harapan sebagai berikut :

1. Harapan yang bersifat meramalkan (*anticipatory*), yaitu harapan tentang suatu perilaku yang akan terjadi.
2. Harapan normatif (*role expectation*), yaitu keharusan yang menyertai suatu peran. Harapan normatif ini dibagi lagi ke dalam dua jenis: Harapan yang terselubung (*convert*), yaitu harapan itu tetap ada walaupun tidak diucapkan.

Harapan yang terbuka (*overt*), yaitu harapan yang diucapkan. Harapan jenis ini dinamai tuntutan peran (*role demand*). Tuntutan peran melalui proses internalisasi dapat menjadi norma bagi peran yang bersangkutan.

c. Wujud perilaku dalam peran (*performance*) Peran diwujudkan dalam perilaku oleh aktor. Wujud perilaku dalam peran ini nyata dan bervariasi, berbeda- berbeda dari satu aktor ke aktor yang lain. Variasi tersebut dalam teori peran dipandang normal dan tidak ada batasnya.

Teori peran tidak cenderung mengklasifikasikan istilah istilahnya menurut perilaku khusus, melainkan berdasarkan klasifikasinya pada sifat asal dari perilaku dan tujuannya (motivasi). Sehingga, wujud perilaku peran dapat

digolongkan misalnya kedalam jenis hasil kerja, hasil sekolah, hasil olahraga, pendisiplinan anak, pencari nafkah, pemeliharaan ketertiban, dan lain sebagainya. Peran dilihat wujudnya dari tujuan dasarnya atau hasil akhirnya, terlepas dari cara mencapai tujuan atau hasil tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan adanya cara-cara tertentu dalam suatu peran yang mendapat sanksi dari masyarakat. Suatu cara menjadi penting dalam perwujudan peran, ketika cara itu bertentangan dengan aspek lain dari peran. Dengan demikian, seorang aktor bebas untuk menentukan cara-cara sendiri selama tidak bertentangan dengan setiap aspek dari peran yang diharapkan darinya.

Terkait perwujudan peran, ada 2 pendapat, yaitu:

1. *Sarbin* menyatakan bahwa perwujudan peran dapat dibagi dalam tujuh golongan menurut intensitasnya berdasarkan keterlibatan diri (*self*) aktor dalam peran yang dibawakannya. Tingkat intensitas yang terendah adalah keadaan di mana diri aktor sangat tidak terlibat. Perilaku peran dibawakan secara otomatis dan mekanistik saja. Sedangkan tingkat yang tertinggi akan terjadi jika aktor melibatkan seluruh pribadinya dalam perilaku peran yang sedang dikerjakan.
2. *Goffman* meninjau perwujudan peran dari sudut yang lain. Dia memperkenalkan istilah permukaan (*front*), yaitu untuk menunjukkan perilaku-perilaku tertentu yang diekspresikan secara khusus agar orang lain mengetahui dengan jelas peran si pelaku (aktor).

d. Penilaian (*evaluation*) dan sanksi (*sanction*) Jika dikaitkan dengan peran, penilaian dan sanksi agak sulit dipisahkan pengertiannya. Mengatakan bahwa antara penilaian dan sanksi didasarkan pada harapan masyarakat (orang

lain) tentang norma. Penilaian peran dalam teori peran adalah kesan positif atau negatif yang diberikan oleh masyarakat berdasarkan norma yang berlaku terhadap suatu perilaku yang dilakukan oleh aktor. Sedangkan sanksi yang dimaksud adalah usaha yang dilakukan seorang aktor dalam mempertahankan suatu nilai positif atau agar perwujudan peran diubah sedemikian rupa sehingga hal yang tadinya dinilai negatif berubah menjadi positif.

Menurut *Biddle dan Thomas*, penilaian maupun sanksi dapat datang dari orang lain (*eksternal*) dari dalam diri sendiri (*internal*). Jika penilaian dan sanksi datang dari luar, berarti bahwa penilaian dan sanksi terhadap peran itu ditentukan oleh perilaku orang lain. Jika penilaian dan sanksi datang dari dalam diri sendiri, maka pelaku sendirilah yang memberi nilai dan sanksi berdasarkan pengetahuannya tentang harapan-harapan dan norma-norma masyarakat. Biasanya penilaian dan sanksi internal terjadi pada peran yang dianggap penting oleh individu yang bersangkutan, sedangkan penilaian dan sanksi eksternal lebih sering berlaku pada peran dan norma yang kurang penting bagi individu tersebut. Kemudian *Biddle dan Thomas* penilaian dan sanksi eksternal disebut juga sebagai penilaian dan sanksi terbuka (*overt*), sedangkan yang internal disebutnya tertutup (*covert*).

Hal tersebut karena penilaian dan sanksi didasarkan pada harapan tentang norma yang timbul dari orang lain yang dikomunikasikan melalui perilaku yang terbuka (*overt*). Tanpa adanya pernyataan melalui perilaku yang terbuka, seseorang tidak dapat memperoleh penilaian dan sanksi atas perilakunya. Menurut *Merton dan Kitt* mengemukakan bahwa, setiap orang memerlukan kelompok

rujukan (*reference group*) tertentu dalam memberikan penilaian dan sanksi. Dan fungsi kelompok rujukan tersebut ada dua macam, yaitu :

1. Fungsi normatif, dalam fungsi ini kelompok mendesakkan suatu standar tertentu bagi perilaku dan keyakinan/ kepercayaan anggotanya. Terlepas dari benar- salahnya standar itu, kelompok mempunyai cukup kekuatan atas individu- individu sehingga mau-tidak-mau individu mengikuti standar tersebut. Jika norma- norma itu diserap (diinternalisasikan) oleh individu, maka terbentuklah nilai dalam diri individu itu, yang selanjutnya akan menjadi pedoman bagi tingkah laku dan kepercayaan.

2. Fungsi komparatif (perbandingan), dalam fungsi ini kelompok hanya dijadikan alat pembanding bagi individu, untuk mengetahui apakah perilaku atau kepercayaannya sudah benar atau masih salah (untuk mengecek kebenaran objektif). Perbandingan ini dapat dilakukan dengan melibatkan diri dalam kelompok maupun tidak. Dalam hal yang terakhir individu hanya memanfaatkan kelompok untuk tujuan normatif.

Kedudukan dan Perilaku Orang Dalam Peran Kedudukan adalah sekumpulan orang yang secara bersamasama (kolektif) diakui perbedaannya dari kelompok- kelompok yang lain berdasarkan sifat- sifat yang mereka miliki bersama, perilaku yang sama- sama mereka perbuat, dan reaksi orang-orang lain terhadap mereka bersama. Ada tiga faktor yang mendasari penempatan seseorang dalam posisi tertentu, yaitu:

1. Sifat- sifat yang dimiliki bersama seperti jenis kelamin, suku bangsa, usia atau ketiga sifat itu sekaligus. Semakin banyak sifat yang dijadikan dasar

kategori kedudukan, semakin sedikit orang yang dapat ditempatkan dalam kedudukan itu.

2. Perilaku yang sama seperti penjahat (karena perilaku jahat), olahragawan, atau pemimpin. Perilaku ini dapat diperinci lagi sehingga kita memperoleh kedudukan yang lebih terbatas. Selain itu, penggolongan kedudukan berdasarkan perilaku ini dapat bersilang dengan penggolongan berdasarkan sifat, sehingga membuat kedudukan semakin eksklusif.

3. Reaksi orang terhadap mereka.

Kaitan Orang dan Perilaku Biddle dan Thomas mengemukakan bahwa kaitan (hubungan) yang dapat dibuktikan atau tidak adanya dan dapat diperkirakan kekuatannya adalah kaitan antara orang dengan perilaku dan perilaku dengan perilaku. Kaitan antara orang dengan orang dalam teori peran ini tidak banyak dibicarakan. Kriteria untuk menetapkan kaitan- kaitan tersebut di atas diantaranya yaitu :

A) Kriteria Kesamaan

1. Diferensiasi (*differentiation*), yaitu seperti norma untuk anggota suatu kelompok sosial tertentu sangat berbeda dari norma- norma untuk orang- orang yang bukan anggota kelompok itu. Hubungan antara kedua jenis norma itu adalah diferensiasi, yaitu ditandai oleh adanya ketidaksamaan.

2. Konsensus (*consensus*), yaitu kaitan antara perilaku-perilaku yang berupa kesepakatan mengenai suatu hal tertentu. Hal yang disepakati bersama itu biasa berupa preskripsi, penilaian, deskripsi, dan sanksi, sedangkan bentuk

konsensus sendiri bisa *overt* atau *kovert*. Jenis- jenis konsensus antara lain sebagai berikut :

- a. konsensus tentang preskripsi yang *overt*, berupa konsensus tentang norma,
- b. konsensus tentang preskripsi yang *kovert*, berupa harapan- harapan tertentu,
- c. konsensus tentang penilaian yang *overt* berupa konsensus tentang nilai, Jika konsensus ditandai oleh kesamaan pandangan, maka ada pula kaitan antara perilaku- perilaku yang ditandai oleh tidak adanya persamaan pandangan.

Keadaan ini disebut disensus (*dissensus*), ada dua bentuk disensus menurut Biddle dan Thomas, yaitu:

- a. Disensus yang tidak terpolarisasi, yaitu ada beberapa pendapat yang berbeda- beda.
 - b. Disensus yang terpolarisasi, yaitu ada dua pendapat yang saling bertentangan. Disensus yang terpolarisasi ini disebut juga konflik.
3. Konflik peran, berdasarkan adanya disensus yang terpolarisasi yang menyangkut peran, yaitu suatu hal yang sangat menarik perhatian ahli- ahli psikologi sosial dan sosiologi. Ada dua macam konflik peran, yaitu konflik antarperan (*inter-role conflict*) yang disebabkan oleh ketidak jelasan antara perilaku yang diharapkan dari satu posisi dengan posisi lainnya pada satu aktor, dan konflik dalam peran (*intra-role conflict*) yang disebabkan oleh tidak jelasnya perilaku yang diharapkan dari suatu posisi tertentu.
4. Keseragaman, yaitu kaitan dua orang lebih memiliki peran yang sama.

5. Spesialisasi, yaitu kaitan orang dan perilaku dalam satu kelompok dibedakan menurut posisi dan peran yang diharapkan dari mereka.

6. Konsistensi, yaitu kaitan antara perilaku dengan perilaku sebelumnya yang saling menyambung. Sebagai lawan dari konsistensi adalah inkonsistensi (*inconsistency*) yang memiliki dua jenis, yaitu:

a. Inkonsistensi logis, misalnya anjuran membunuh dalam peperangan adalah inkonsistensi dengan firman tuhan dalam 10 perintah tuhan bahwa “kau tidak boleh membunuh”

b. Inkonsistensi kognitif, yaitu adanya dua atau lebih perilaku yang inkonsistensi pada satu orang. Contoh, seseorang menjadi anggota polisi, tetapi ia juga menjadi kepala perampok.

Derajat Saling Ketergantungan Derajat saling ketergantungan, pada kaitan ini suatu hubungan orang- perilaku akan mempengaruhi, menyebabkan, atau menghambat hubungan orang- perilaku yang lain.

1. Rangsangan dan hambatan (*facilitation & bidrance*), ada tiga jenis saling ketergantungan yaitu pertama, tingkah laku A merangsang atau menghambat tingkah laku B. Kedua, tingkah laku A dan B saling merangsang atau menghambat. Ketiga, tingkah laku A dan B tidak saling tergantung.

2. Ganjaran dan harga (*reward & cost*), Biddle dan Thomas mengemukakan tiga jenis ketergantungan yang menyangkut ganjaran dan harga untuk perilaku- perilaku yang saling berkaitan yaitu pertama, tingkah laku A menentukan ganjaran yang diterima atau harga yang harus dibayar oleh B. Kedua, tingkah laku A dan B saling menentukan ganjaran atau harga masing- masing.

Ketiga, tingkah laku A dan B tidak saling menentukan ganjaran atau harga masing-masing.

Gabungan antara Derajat Kesamaan dan Saling Ketergantungan :

1. Konformitas (*conformity*), yaitu kesamaan atau kesesuaian antara perilaku seseorang dengan perilaku orang lain atau perilaku seseorang dengan harapan orang lain tentang perilakunya. Konsep ini sangat penting dalam teori peran.

2. Penyesuaian (*adjustmen*), yaitu perbedaan atau ketidaksesuaian antara perilaku seseorang dengan perilaku orang lain atau perilaku seseorang dengan harapan orang lain tentang perilakunya.

3. Kecermatan (*accuracy*), yaitu ketepatan penggambaran (deskripsi) suatu peran. Deskripsi peran yang cermat (*accurate*) adalah deskripsi yang sesuai dengan harapanharapan tentang peran itu dan sesuai dengan perilaku nyata yang ditunjukkan oleh orang yang memegang peran itu.

Dalam penelitian ini teori peran digunakan sebagai kerangka deskriptif dan evaluatif terhadap tindakan dan perilaku *The Sunan Giri Foundation (SAGAF)*. Tindakan dan perilaku mereka dilukiskan dalam konteks posisi sosial yang mereka miliki di Kabupaten Gresik sebagai organisasi kepemudaan. Posisi ini ditentukan oleh beberapa aspek sosial termasuk norma, tuntutan, dan tata aturan yang ada di lingkungan Kabupaten Gresik. Posisi mereka juga ditentukan oleh peran yang dijalankan orang lain pada posisi serupa pada kapasitas yang mereka miliki sebagai individu dalam posisi tersebut.

Perbedaan Peran dan Kedudukan Kedudukan sendiri sering diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial. Dengan demikian, seseorang dikatakan mempunyai beberapa kedudukan karena biasanya dia ikut serta dalam berbagai pola kehidupan yang beragam. Dalam pengertiannya, peran (*role*) adalah sesuatu yang diharapkan yang dimiliki oleh individu yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dalam kehidupan masyarakat.

Peran erat kaitannya dengan status, dimana di antara keduanya sangat sulit dipisahkan. Peran adalah pola perilaku yang terkait dengan status. Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan kewajiban sesuai dengan kedudukan maka ia menjalankan suatu peran. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah hanya sebatas kepentingan ilmu pengetahuan. Tidak ada peran tanpa adanya kedudukan dan begitu juga tidak ada kedudukan yang tidak mempunyai peran di masyarakat secara langsung.

Setiap orang mempunyai peranan masing-masing dalam kehidupannya sesuai dengan pola lingkungan hidupnya. Hal ini berarti bahwa peranan menentukan terhadap perbuatan bagi seseorang. Pentingnya peran adalah dengan adanya peran yang diperoleh dari kedudukan akan bisa menentukan dan mengatur perilaku masyarakat atau orang lain.

2.2.2 Karakteristik Peranan

Berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia, peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa. Menurut Soejono Soekanto (2012:212) dalam buku yang berjudul sosiologi suatu pengantar , menjelaskan pengertian peranan merupakan aspek

dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya.

Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Peranan adalah suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. Kepribadian seseorang barangkali juga amat mempengaruhi bagaimana peranan harus dijalankan. Peranan timbul karena seseorang memahami bahwa ia bekerja tidak sendirian. Mempunyai lingkungan, yang setiap saat diperlukan untuk berinteraksi.

Lingkungan itu luas dan beraneka macam, dan masing-masing akan mempunyai lingkungan yang berlainan. Tetapi peranan yang harus dimainkan pada hakekatnya tidak ada perbedaan Miftah Thoha (2012:10). Menurut *Mintzberg* dalam buku Pengantar Manajemen Dan buku Kepemimpinan Dalam Manajemen yang di tulis oleh Siswanto dan Miftah Thoha (2012: 21 dan 12), ada tiga peran yang dilakukan pemimpin dalam organisasi yaitu:

1. Peran Antarperibadi (*Interpersonal Role*), dalam peranan antar pribadi, atasan harus bertindak sebagai tokoh, sebagai pemimpin dan sebagai penghubung agar organisasi yang dikelolanya berjalan dengan lancar. Peranan ini oleh *Mintzberg* dibagi atas tiga peranan yang merupakan perincian lebih lanjut dari peranan antarpribadi ini. Tiga peranan ini dijelaskan sebagai berikut:

a. Peranan sebagai tokoh (*Figurehead*), yakni suatu peranan yang dilakukan untuk mewakili organisasi yang dipimpinnya didalam setiap kesempatan dan persoalan yang timbul secara formal.

b. Peranan sebagai pemimpin (*Leader*), dalam peranan ini atasan bertindak sebagai pemimpin. Ia melakukan hubungan interpersonal dengan yang dipimpin, dengan melakukan fungsi-fungsi pokoknya diantaranya pemimpin, memotifasi, mengembangkan, dan mengendalikan.

c. Peranan sebagai pejabat perantara (*Liaison Manager*), disini atasan melakukan peranan yang berinteraksi dengan teman sejawat, staf, dan orang-orang yang berada diluar organisasinya, untuk mendapatkan informasi.

2. Peranan Yang Berhubungan Dengan Informasi (*Informational Role*), peranan interpersonal diatas meletakkan atasan pada posisi yang unik dalam hal mendapatkan informasi. Peranan interpersonal diatas *Mintzberg* merancang peranan kedua yakni yang berhubungan dengan informasi ini. Peranan itu terdiri dari peranan-peranan sebagai berikut:

a. Peran pemantau (*Monitor*), peranan ini mengidentifikasikan seorang atasan sebagai penerima dan mengumpulkan informasi. Adapun informasi yang diterima oleh atasan ini dapat dikelompokkan atas lima kategori berikut :

1) Internal operations, yakni informasi mengenai kemajuan pelaksanaan pekerjaan didalam organisasi, dan semua peristiwa yang ada hubungannya dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut.

2) Peristiwa-peristiwa diluar organisasi (*external events*), informasi jenis ini diterima oleh atasan dari luar organisasi, misalnya informasi dari langganan, hubungan-hubungan pribadi, pesaing- pesaing, asosiasi-asosiasi dan semua informasi mengenai perubahan atau perkembangan ekonomi, politik, dan teknologi, yang semuanya itu amat bermanfaat bagi organisasi.

3) Informasi dari hasil analisis, semua analisis dan laporan mengenai berbagai isu yang berasal dari bermacam-macam sumber sangat bermanfaat bagi atasan untuk diketahui.

4) Buah pikiran dan kecenderungan, atasan memerlukan suatu sasaran untuk mengembangkan suatu pengertian atas kecenderungan-kecenderungan yang tumbuh dalam masyarakat, dan mempelajari tentang ide-ide atau buah pikiran yang baru.

5) Tekanan-tekanan, atasan perlu juga mengetahui informasi yang ditimbulkan dari tekanan-tekanan dari pihak-pihak tertentu.

b. Sebagai diseminator, peranan ini melibatkan atasan untuk menagani proses transmisi dari informasi-informasi kedalam organisasi yang dipimpinnya.

c. Sebagai juru bicara (*Spokesman*), peranan ini dimainkan manajer untuk menyampaikan informasi keluar lingkungan organisasinya.

3. Peranan Pengambil Keputusan (*Decisional Role*), dalam peranan ini atasan harus terlibat dalam suatu proses pembuatan strategi di dalam organisasi yang di pimpinnya. Mintzberg berkesimpulan bahwa pembagian besar tugas atasan pada hakikatnya digunakan secara penuh untuk memikirkan sistem pembuatan strategi organisasinya. Keterlibatan ini disebabkan karena:

- a. Secara otoritas formal adalah satu-satunya yang diperbolehkan terlibat untuk memikirkan tindakan-tindakan yang penting atau yang baru dalam organisasinya.
- b. Sebagai pusat informasi, atasan dapat memberikan jaminan atas keputusan yang terbaik, yang mencerminkan pengetahuan yang terbaru dan nilai-nilai organisasi.
- c. Keputusan-keputusan yang strategis akan lebih mudah diambil secara terpadu dengan adanya satu orang yang dapat melakukan kontrol atas semuanya, Siswanto (2012 : 21).

Ada empat peranan atasan/manajer yang di kelompokkan kedalam pembuatan keputusan:

1) Peranan sebagai entrepreneur, dalam peranan ini Mintzberg mengemukakan peranan entrepreneur dimulai dari aktifitas melihat atau memahami secara teliti persoalan-persoalan organisasi yang mungkin bisa digarap.

2) Peranan sebagai penghalau gangguan (*disturbance handler*), peranan ini membawa atasan untuk bertanggung jawab terhadap organisasi ketika organisasinya terancam bahaya, misalnya: akan bubar, terkena gosip, isu-isu kurang baik, dan sebagainya.

3) Peranan sebagai pembagi sumber (*resource allocator*), membagi sumber dana adalah suatu proses pembuatan keputusan. Di sini seorang atasan mengambil peranan dalam mengambil keputusan kemana sumber dana yang akan didistribusikan ke bagian-bagian dari organisasinya. Sumber dana ini meliputi sumber yang berupa uang, waktu, perbekalan tenaga kerja dan reputasi.

4) Peranan sebagai negosiator, peranan ini meminta kepada atasan untuk aktif berpartisipasi dalam arena negosiasi, Miftah Thoha (2012 :12).

1. Hendaknya tidak saling mementingkan diri sendiri
2. Memahami kepentingan yang ada pada lawan negosiator
3. Menemukan jalan tengah antara kedua kepentingan
4. Perlunya strategi dalam bernegosiasi
5. Akhiri negosiasi dengan kesepakatan yang seimbang.

Menurut David Berry (2003:105), mendefenisikan peranan sebagai harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Harapan-harapan tersebut merupakan imbalan dari norma-norma sosial dan oleh karena itu dapat dikatakan bahwa peranan itu ditentukan oleh norma-norma didalam masyarakat. Dalam peranan itu terdapat dua harapan yaitu harapan yang dimiliki oleh si pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang yang menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya.

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa peran adalah perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang karena kewajibannya dari jabatan atau pekerjaannya. Menurut Veitzal Rivai (2004: 148), peranan diartikan sebagai

perilaku yang diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu. Selanjutnya menurut Ali (2000: 148) peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa semakin tinggi kedudukan seseorang dalam suatu hierarki organisasi, semakin sedikit keterampilan teknis yang diperlukan. Sebaliknya, semakin rendah kedudukan seseorang dalam suatu hierarki organisasi.

Semakin penting keterampilan teknis yang diperlukan, Siswanto (2012:21). Menurut Soejono Soekanto (2012:213) peranan mencakup dalam tiga hal yaitu : 1. Peranan meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Norma-norma tersebut secara sosial di kenal ada empat meliputi:

a) Cara(*Usage*); lebih menonjol di dalam hubungan antarindividu dalam masyarakat. Suatu penyimpangan terhadapnya tak akan mengakibatkan hukuman yang berat, akan tetapi hanya sekedar celaan dari individu yang dihubunginy

b) Kebiasaan (*folkways*), sebagai perbuatan yang berulang-ulang dalam bentuk yang sama merupakan bukti bahwa orang banyak menyukai perbuatan tersebut.

c) Tata kelakuan (*mores*), merupakan cerminan sifat-sifat yang hidup dari kelompok manusia yang dilaksanakan sebagai alat pengawas, secara sadar maupun tidak sadar, oleh masyarakat terhadap anggota-anggotanya.

d) Adat istiadat (*custom*), merupakan tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat dapat meningkatkan kekuatan mengikatnya menjadi custom atau adat istiadat. Soejono Soekanto (2012:174).

2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Perilaku individu adalah aktivitas seorang atasan dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian dan pengendalian untuk mengambil keputusan tentang kecocokan antar individu, tugas pekerjaan dan efektivitas. Keputusan tersebut dipengaruhi oleh ciri atasan dan bawahan yang dipengaruhi oleh perilaku individu. Ada 4 ciri utama individu, yaitu:

1. Persepsi (*perception*) adalah proses pemberian arti terhadap lingkungan oleh individu.

2. Sikap (*attitude*) adalah kesiapsiagaan mental yang diorganisasikan melalui pengalaman yang memiliki pengaruh tertentu terhadap tanggapan seseorang terhadap orang, obyek, dan situasi yang berhubungan dengannya.

3. Kepribadian adalah serangkaian ciri yang relatif mantap, kecenderungan dan perangai yang sebagian besar dibentuk oleh faktor keturunan dan oleh faktor-faktor sosial, kebudayaan dan lingkungan.

4. Belajar adalah proses terjadinya perubahan yang relatif tetap dalam perilaku sebagai akibat dari praktek. (Siswanto, 2012:76). Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa peranan adalah suatu kompleks

penghargaan seseorang terhadap cara menentukan sikap dan perbuatan dalam situasi tertentu berdasarkan atas kedudukan sosial tertentu.

2.3 Definisi Partai Politik

Partai politik dalam dunia perpolitikan, khususnya dalam politik lokal akan mudah dipahami dengan mengerti terlebih dahulu definisi partai politik. Ada tiga teori yang mencoba menjelaskan asal usul partai politik. Pertama, teori kelembagaan yang melihat ada hubungan antara parlemen awal dan timbulnya partai politik, kedua, teori situasi historik yang melihat timbulnya partai politik sebagai upaya suatu sistem politik untuk mengatasi krisis yang ditimbulkan dengan perubahan masyarakat secara luas. Ketiga, teori pembangunan yang melihat partai politik sebagai produk modernisasi sosial ekonomi (Ramlan Surbakti, 1992:113).

Partai politik pertama lahir di negara-negara Eropa Barat. Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik, maka partai-partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat dan pemerintah (Bambang Sunggono, 1992:7). Partai politik terlahir untuk mewujudkan suatu gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diikuti sertakan dalam proses politik. Melalui partai politik inilah rakyat turut berpartisipasi dalam hal memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi-aspirasinya atau kepentingan-kepentingannya. Dengan demikian, proses artikulasi kepentingan tersalurkan melalui partai politik. Berangkat dari anggapan bahwa dengan membentuk wadah organisasi partai politik bisa menyatukan orang-orang yang mempunyai pikiran serupa sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa

dikonsolidasikan. Dengan begitu pengaruh mereka bisa lebih besar dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan (Miriam Budiardjo, 2008: 403).

Definisi partai politik telah dikemukakan oleh beberapa ahli politik, diantaranya menurut ahli politik Carl J. Friedrich yang dikutip (dalam Miriam Budiardjo, 2008: 403) adalah sebagai berikut. Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil serta materiil. (*a political party is a group of human beings, stably organized with the objective of securing or maintaining for its leader the control of a government, with the further objective of giving to member of the party, through such control ideal and material benefits and advantages*) (Miriam Budiardjo, 2008: 404). Kemudian Sigmund Neumann (dalam Miriam Budiardjo, 2008: 403) mengemukakan definisi partai politik sebagai berikut.

Partai politik adalah organisasi dari aktifitas-aktifitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda (*a political party is the articulate organization of society's active political agent; those who are concerned with the control of governmental policy power, and who compete for popular support with other group or groups holding divergent view*) (Miriam Budiardjo 2008: 404).

Menurut Ramlan Surbakti (1992: 116) menyatakan bahwa “partai politik merupakan sekelompok orang yang terorganisir secara rapi yang dipersatukan

oleh persamaan ideologi yang bertujuan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemilihan umum guna melaksanakan alternative kebijakan yang telah mereka susun”. Alternatif kebijakan umum yang disusun ini merupakan hasil pemanduan berbagai kepentingan yang hidup dalam masyarakat, sedangkan cara mencari dan mempertahankan kekuasaan guna melaksanakan kebijakan umum dapat melalui pemilihan umum dan cara-cara lain yang sah.

Dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2008 tentang partai politik pasal 1 ayat 1, partai politik didefinisikan sebagai organisasi yg bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perspektif kelembagaan, partai politik adalah mata rantai yang menghubungkan antara rakyat dan pemerintah. Atau dalam bahasa lain, partai politik menjadi jembatan antara masyarakat sipil dengan pemerintah (Timothy,1998:11).

Dari berbagai penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa partai politik merupakan sebuah organisasi yang dibentuk berdasarkan kumpulan orang-orang yang memiliki kesamaan tujuan untuk mendapatkan sebuah kekuasaan dalam pemerintahan dan menjadi penghubung antara masyarakat sipil dengan pemerintah, yang memberikan informasi secara *bottom up* maupun *top down*.

2.3.1 Peran Partai Politik

Peran partai politik dirumuskan berdasarkan definisi peran dan definisi partai politik, yang kemudian dipermudah penentuannya dalam fungsi-fungsi

partai politik. Fungsi yang dilaksanakan partai politik menggambarkan peran yang sedang dilakukan partai politik. Adapun beberapa peran partai politik yang dapat dirumuskan berdasarkan fungsifungsi partai politik adalah sebagai berikut:

a. Komunikator Politik

Dalam komunikasi politik, komunikator politik merupakan salah satu faktor yang menentukan efektivitas komunikasi. Beberapa studi mengidentifikasi sejumlah karakteristik yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain. Komunikator politik disini adalah orang yang secara tetap dan berkesinambungan melakukan komunikasi politik. Sosiolog J.D Halloran, seorang pengamat komunikasi massa, berpendapat bahwa Komunikator politik memainkan peran sosial yang utama, terutama dalam proses pembentukan suatu opini publik. Salah satu teori opini publik yang seluruhnya dibangun di sekitar komunikator politik, yaitu teori pelopor mengenai opini publik. Dalam hal ini menegaskan bahwa pemimpin menciptakan opini publik karena mereka berhasil membuat beberapa gagasan yang mula-mula ditolak, kemudian dipertimbangkan, dan akhirnya diterima. Meskipun setiap orang boleh berkomunikasi tentang politik, namun yang melakukannya secara tetap dan berkesinambungan jumlahnya relatif sedikit. Walaupun sedikit, para komunikator politik ini memainkan peran sosial yang utama, terutama dalam proses opini publik. Dan Nimmo (1989) mengklasifikasikan komunikator utamadalam politik sebagai berikut: politikus; professional; dan aktivis.

1) Politikus

Politikus adalah orang yang bercita-cita untuk dan atau memegang jabatan pemerintah, tidak peduli apakah mereka dipilih, ditunjuk, atau pejabat karier, dan tidak mengindahkan apakah jabatan itu eksekutif, legislatif, atau yudikatif. Daniel Katz (dalam Nimmo, 1989) membedakan politikus ke dalam dua hal yang berbeda berkenaan dengan sumber kejuangan kepentingan politikus pada proses politik. Yaitu: politikus ideolog (negarawan); serta politikus partisan. Politikus ideolog adalah orang-orang yang dalam proses politik lebih memperjuangkan kepentingan bersama/publik. Mereka tidak begitu terpusat perhatiannya kepada mendesak tuntutan seorang langganan atau kelompoknya. Mereka lebih menyibukkan dirinya untuk menetapkan tujuan kebijakan yang lebih luas, mengusahkan reformasi, bahkan mendukung perubahan revolusioner-jika hal ini mendatangkan kebaikan lebih bagi bangsa dan negara. Sedangkan politikus partisan adalah orang-orang yang dalam proses politik lebih memperjuangkan kepentingan seorang langganan atau kelompoknya. Dengan demikian, politikus utama yang bertindak sebagai komunikator politik yang menentukan dalam pemerintah Indonesia adalah: para pejabat eksekutif (presiden, menteri, gubernur, dsb.); para pejabat Legislatif (ketua MPR, Ketua DPR/DPD, Ketua Fraksi, Anggota DPR/DPD, dsb.); para pejabat yudikatif (Ketua/anggota Mahkamah Agung, Ketua/anggota Mahkamah Konstitusi, Jaksa Agung, jaksa, dsb.).

2) Profesional

Komunikator profesional adalah peranan sosial yang relatif baru, suatu hasil sampingan dari revolusi komunikasi yang sedikitnya mempunyai dua dimensi utama: munculnya media massa; dan perkembangan serta merta media

khusus (seperti majalah untuk khalayak khusus, stasiun radio, dsb.) yang menciptakan publik baru untuk menjadi konsumen informasi dan hiburan. Baik media massa maupun media khusus mengandalkan pembentukan dan pengelolaan lambang-lambang dan khalayak khusus.

3) Aktivis

Aktivist adalah komunikator politik utama yang bertindak sebagai saluran organisasional dan interpersonal. Pertama, terdapat jurubicara bagi kepentingan yang terorganisasi. Pada umumnya orang ini tidak memegang ataupun mencitakan jabatan pada pemerintah; dalam hal ini komunikator tersebut tidak seperti politikus yang membuat politik menjadi lapangan kerjanya. Jurubicara ini biasanya juga bukan profesional dalam komunikasi. namun, ia cukup terlibat baik dalam politik dan semiprofesional dalam komunikasi politik. Richard E. Petty dan John T. Cacioppo dalam bukunya *Attitudes and Persuasion: Classic and Contemporary Approaches*, dikatakan bahwa ada empat komponen yang harus ada pada komunikator politik, yaitu *communicator credibility*, *communicator attractiveness*, *communicator similarity* dan *communicator power* (Petty, 1996).

a. Kredibilitas

Kredibilitas sumber mengacu pada sejauh mana sumber dipandang memiliki keahlian dan dipercaya. Semakin ahli dan dipercaya sumber informasi, semakin efektif pesan yang disampaikan. Kredibilitas mencakup keahlian sumber (*source expertise*) dan kepercayaan sumber (*source trustworthiness*).

b. Daya tarik

Daya tarik seorang komunikator bisa terjadi karena penampilan fisik, gaya bicara, sifat pribadi, keakraban, kinerja, keterampilan komunikasi dan

perilakunya. Sebagaimana dikemukakan Petty (1996): *“Two communicators may be trusted experts on some issue, but one may be more liked or more physically attractive than the other... in part because of his physical appearance, style of speaking and mannerism, ...the attractiveness is due to the performance, communication skills, self evaluation ... by verbal and by the behavioral measure.”* Daya tarik fisik sumber (*source physical attractiveness*) merupakan syarat kepribadian. Daya tarik fisik komunikator yang menarik umumnya lebih sukses daripada yang tidak menarik dalam mengubah kepercayaan. Beberapa item yang menggambarkan daya tarik seseorang adalah tampan atau cantik, sensitif, hangat, rendah hati, gembira, dan lain-lain.

c. Kesamaan

Sumber disukai oleh *audience* bisa jadi karena sumber tersebut mempunyai kesamaan dalam hal kebutuhan, harapan dan perasaan. Dari kacamata *audience* maka sumber tersebut adalah sumber yang menyenangkan (*source likability*), yang maksudnya adalah perasaan positif yang dimiliki konsumen (*audience*) terhadap sumber informasi.

d. Power

Power, menurut Petty (1996) adalah *“the extent to which the source can administer rewards or punishment.”* Sumber yang mempunyai power, menurutnya, akan lebih efektif dalam penyampaian pesan dan penerimaannya daripada sumber yang kurang atau tidak mempunyai power. Pada dasarnya, orang akan mencari sebanyak mungkin penghargaan dan menghindari hukuman. Sebagaimana dikemukakan oleh Kelman (dalam Petty, 1996) bahwa, *“people simply report more agreement with the powerful source to maximize their rewards*

and minimize their punishment.” Berdasarkan teori komunikator diatas, peran komunikator dalam partai politik sangat jelas kedudukannya yang jika diklasifikasikan dalam jenis komunikator, partai politik dapat muncul sebagai komunikator yg berasal dari politikus dengan kader partai yang menduduki badan eksekutif maupun legislatif dan berasal dari aktivis, sebagai organisasi yang memiliki massa.

2.3.2 Fungsi Partai Politik

Untuk memahami peran partai politik, akan lebih mudah apabila memahami terlebih dahulu fungsi dari partai politik seperti yang dijelaskan oleh Miriam Budiardjo dalam A. Rahman H. I (2007:103-104) terkait fungsi partai politik yang melekat dalam suatu partai politik sebagai berikut.

2.3.2.1 Komunikasi Politik

Komunikasi politik merupakan fungsi menyalurkan berbagai macam pendapat dan aspirasi masyarakat ditengah keberagaman pendapat masyarakat modern yang terus berkembang. Pendapat atau aspirasi seseorang atau suatu kelompok akan hilang tidak berbekas apabila tidak ditampung dan digabung dengan pendapat dan aspirasi orang lain yang senada, proses tersebut dinamakan (*interest aggregation*). Setelah penggabungan pendapat dan aspirasi tersebut diolah dan dirumuskan sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang (*interest articulation*). Jika peran utama ini tidak dilakukan pasti akan terjadi kesimpang siuran isu dan saling berbenturan. Setelah itu, partai politik merumuskannya menjadi usul kebijakan yang kemudian dimasukan dalam program atau *platform* partai untuk diperjuangkan atau disampaikan melalui

parlemen kepada pemerintah agar dijadikan kebijakan umum (*public policy*). Demikianlah tuntutan masyarakat disampaikan kepada pemerintah melalui partai politik.

Di sisi lain, partai politik juga berfungsi memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Dengan demikian terjadi dua arus komunikasi dari atas ke bawah maupun bawah ke atas informasi tersampaikan dengan baik. Peran partai sebagai penghubung sangat penting, karena disatu pihak kebijakan pemerintah perlu dijelaskan kepada seluruh masyarakat, dan dipihak lain juga pemerintah harus tanggap terhadap tuntutan masyarakat. Menurut Sigmund Neumann dalam hubungannya dengan komunikasi politik, partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga pemerintah yang resmi dan yang mengaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat politik yang lebih luas. Namun tak jarang pelaksanaan fungsi komunikasi politik ini menghasilkan informasi yang mengandung isu-isu yang meresahkan masyarakat karena memihak salah satu kelompok (Miriam Budiardjo, 2008:406).

2.3.2.2 Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik merupakan sebuah proses dimana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana dia berada. Proses ini merupakan faktor penting dalam terbentuknya budaya politik (*political culture*) suatu bangsa karena proses penyampaian tersebut berupa norma-norma dan nilai-nilai dari suatu

generasi ke generasi berikutnya. Suatu definisi yang dirumuskan oleh seorang ahli sosiologi politik M. Rush (dalam A. Rahman H.I., 2007:103-104) adalah sebagai berikut:

Sosialisasi politik adalah proses yang melaluinya orang dalam masyarakat tertentu belajar mengenali sistem politiknya. Proses ini sedikit banyak menentukan persepsi dan reaksi mereka terhadap fenomena politik (*political socialization may be defined is the process by which individuals in a given society become acquainted with the political system and which to a certain degree determines their perceptions and their reactions to political phenomena*).

A. Rahman H. I. juga mengatakan bahwa fungsi sosialisasi politik partai juga dapat dipandang sebagai suatu upaya menciptakan citra bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum. Ini penting jika dikaitkan dengan tujuan partai untuk menguasai pemerintahan melalui kemenangan dalam pemilihan umum. Lebih penting lagi apabila partai politik dapat menjalankan fungsi sosialisasi untuk mendidik anggota-anggotanya menjadi manusia yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga negara dan menempatkan kepentingan sendiri dibawah kepentingan bersama.

2.3.2.3 Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik merupakan fungsi untuk mempersiapkan kepemimpinan internal maupun nasional karena setiap partai membutuhkan kader-kader yang berkualitas untuk dapat mengembangkan partainya. Rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai, sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon-calon pemimpin.

2.3.2.4 Pengatur Konflik Politik

Pengatur konflik politik merupakan fungsi untuk membantu mengatasi konflik diantara masyarakat atau sekurang-kurangnya dapat diatur sedemikian rupa sehingga akibat negatifnya dapat ditekan seminimal mungkin. Pendapat lain menurut ahli Arend Lijphart (dalam A. Rahman H.I., 2007:103-104) perbedaan-perbedaan atau perpecahan ditingkat massa bawah dapat diatasi oleh kerja sama diantara elite-elite politik. Dalam konteks kepartaian, para pemimpin partai adalah elite politik. Teori fungsi partai milik Miriam Budiardjo diatas selaras dengan fungsi partai politik berdasarkan undang-undang partai politik di Indonesia yaitu, Undang – Undang No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 11 ayat 1 menyatakan bahwa partai politik adalah sebagai sarana :

- a. Pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b. Penciptaan iklim yang kondusif serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk mensejahterakan masyarakat.
- c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
- d. Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
- e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Dengan melekatnya beberapa fungsi dalam partai politik diatas, partai politik menjadi salah satu aktor penting bagi tegaknya negara demokrasi. Hal ini dikarenakan partai politik menjadi sarana mobilitas aspirasi masyarakat dan

pemerintah. Selain itu, partai politik menjadi sarana informasi dalam memberikan penjelasan mengenai keputusan-keputusan politik yang diambil pemerintah. Secara ringkas partai politik dapat dikatakan sebagai penghubung antara warga negara dengan pemerintahnya. Selain itu partai juga melakukan fungsi-fungsi seperti komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik, pengatur konflik politik, pendidikan politik, pemersatu kebangsaan untuk mensejahterakan masyarakat, dan partisipasi politik. Pelaksanaan fungsi-fungsi ini dapat dijadikan instrumen untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan partai politik dalam menjalankan tugasnya.

2.4 Pemilihan Kepala Daerah

Pengertian Pemilihan Kepala Daerah Pemilu dapat dirumuskan sebagai mekanisme pendelegasian kedaulatan rakyat kepada peserta pemilu dan/atau calon anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik sesuai dengan kehendak rakyat. Pemilu juga berarti mekanisme perubahan politik mengenai pola dan arah kebijakan publik, dan atau mengenai sirkulasi elite, yang dilakukan secara periodik dan tertib.

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, atau seringkali disebut Pilkada atau Pemilukada, adalah bagian dari implementasi demokrasi. Kepala Daerah adalah jabatan politik yang bertugas memimpin dan menggerakkan lajunya roda pemerintahan. Terminologi jabatan publik artinya kepala daerah menjalankan fungsi pengambilan keputusan langsung dengan kepentingan rakyat atau publik, berdampak kepada rakyat dan dirasakan. oleh

Karena itu Kepala Daerah harus dipilih oleh rakyat dan wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Sedangkan makna jabatan politik adalah bahwa mekanisme rekrutmen kepala daerah dilakukan secara politik yaitu melalui pemilihan yang melibatkan elemen – elemen politik yaitu dengan menyeleksi rakyat terhadap tokoh yang mencalonkan sebagai kepala daerah. Dalam kehidupan politik di daerah, pilkada merupakan kegiatan yang nilainya sejajar dengan pemilihan legislative, terbukti kepala daerah dan DPRD menjadi mitra. Dalam pasal 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 menjelaskan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis. (Wikipedia Indonesia.com/Defenisi Kepala Daerah)

Dasar Hukum Pemilihan Kepala Daerah Undang Undang Dasar 1945 merupakan suatu perangkat peraturan yang menentukan kekuasaan dan tanggung jawab dari berbagai alat kenegaraan, Undang Undang Dasar 1945 juga menentukan batas batas berbagai pusat kekuasaan itu dan memaparkan hubungan – hubungan diantara mereka .

Materi yang diatur dalam peraturan perundangundangan yang berada dibawah Undang Undang Dasar 1945 tidak diperbolehkan bertentangan dengan materi Undang – Undang Dasar 1945. Materi - materi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pemilihan umum maupun tentang penyelenggara pemilihan umum yang terdapat dalam Undang – Undang Dasar 1945 harus diterjemahkan kembali dalam Undang – Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), dan sebagainya. Pasal pasal yang terdapat di dalam Undang – Undang Dasar 1945 harus dijadikan rujukan utama dalam pembuatan Undang – undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang (Perpu) dan sebagainya dan yang menjadi Dasar Hukum Pemilihan Kepala Daerah adalah:

- a. Undang – Undang Dasar 1945
- b. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- c. Undang Undang No 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017

e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Sistem Pemilihan Kepala Daerah Sistem pemilu adalah seperangkat metode yang mengatur warga negara untuk memilih para wakilnya yang akan duduk di lembaga legislatif dan eksekutif. Sistem pemilihan ini penting dalam suatu sistem pemerintahan demokrasi perwakilan⁴, sebab :

1. Sistem pemilihan mempunyai konsekuensi pada tingkat proporsionalitas
2. Sistem pemilihan memengaruhi bentuk kabinet yang akan dibentuk
3. Sistem pemilihan membentuk sistem kepartaian, khusus berkaitan dengan jumlah partai politik yang ada di dalam sistem kepartaian tersebut
4. Sistem pemerintahan memengaruhi akuntabilitas pemerintahan, khususnya akuntabilitas para wakil terhadap pemilihnya
5. Sistem pemilu mempunyai dampak pada tingkat kohesi partai politik
6. Sistem pemilihan berpengaruh terhadap bentuk dan tingkat partisipasi politik warga
7. Sistem pemilihan adalah elemen demokrasi yang lebih mudah untuk dimanipulasi dibandingkan dengan elemen demokrasi lainnya, oleh karena itu, jika suatu negara bermaksud mengubah tampilan atau wajah demokrasinya. Hal itu dapat dilakukan dengan mudah melalui perubahan sistem pemilunya

8. Sistem pemilihan juga dapat dimanipulasi melalui berbagai peraturan yang tidak demokratis dalam tingkat pelaksanaannya.

Di kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lambang, sekaligus tolok ukur, dari demokrasi itu. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat. Sekalipun demikian, disadari bahwa pemilihan umum tidak merupakan satu satunya tolok ukur dan perlu dilengkapi dengan pengukuran beberapa kegiatan lain yang lebih bersifat berkesinambungan, seperti partisipasi dalam kegiatan partai, *lobbying*, dan sebagainya.

Pemilihan terhadap jenis sistem pilkada langsung selalu mempertimbangkan aspek “legitimasi” dan “efisiensi”, yang selalu merupakan “*trade off*”. Artinya, memilih sistem yang legitimasi tinggi selalu mengandung konsekuensi sangat tidak efisien. Sebaliknya, kalau semata-mata mengutamakan efisiensi akan melahirkan hasil pilkada yang legitimasinya rendah. Sistem pemilihan kepala daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap watak dan karakter persaingan calon kepala daerah. Yang dimaksud karakter dan watak persaingan adalah ciri ciri dan kecenderungan yang menonjol dari kompetisi dalam pilkada juga bisa dirancang untuk memperlancar perilaku politik tertentu karena sistem pemilihan dapat dengan mudah dimanipulasi.

Demikian halnya dengan sistem pilkada langsung memiliki ciri-ciri dan kecenderungan yang menonjol dari jenis kompetisi yang dilakukan, oleh sebab itu pilkada langsung seharusnya memperhitungkan dengan cermat kecenderungan

tersebut dan faktor yang mempengaruhinya. Untuk mengetahui kemungkinan penerapan sistem pilkada langsung perlu ditinjau berbagai jenis sistem pilkada langsung, diantaranya :

1. *First Past the Post System* Sistem *first past the post system* ini dikenal sebagai sistem yang sederhana dan efisien. Calon kepala daerah yang memperoleh suara terbanyak otomatis memenangkan pilkada dan menduduki kursi kepala daerah. Karenanya sistem ini dikenal juga dengan sistem mayoritas sederhana (*simple majority*). Konsekuensinya, calon kepala daerah dapat memenangkan pilkada walaupun hanya meraih kurang dari separoh suara jumlah pemilih sehingga legitimasinya sering dipersoalkan.

2. *Preferential Voting System* atau *Approval Voting System* Cara kerja sistem *Preferential Voting System* atau *Approval Voting System* adalah pemilih memberikan peringkat pertama, kedua, ketiga dan seterusnya terhadap calon - calon Kepala Daerah yang ada pada saat pemilihan. Seorang calon akan otomatis memenangkan pilkada langsung dan terpilih menjadi Kepala Daerah jika perolehan suaranya mencapai peringkat pertama yang terbesar. Sistem ini dikenal sebagai mengakomodasi sistem mayoritas sederhana (*simple majority*) namun dapat membingungkan proses penghitungan suara di setiap tempat pemungutan suara (TPS) sehingga penghitungan suara mungkin harus dilakukan secara terpusat.

3. *Two Round System* atau *Run-off system* Sesuai namanya, cara kerja sistem two round ini pemilihan dilakukan dengan dua putaran (*run-off*) dengan catatan jika tidak ada calon yang memperoleh mayoritas absolut (lebih dari 50

persen) dari keseluruhan suara dalam pemilihan putaran pertama. Dua pasangan calon Kepala daerah dengan perolehan suara terbanyak harus melalui putaran kedua beberapa waktu setelah pemilihan putaran pertama. Lazimnya, jumlah suara minimum yang harus diperoleh para calon pada pemilihan putaran pertama agar dapat ikut dalam pemilihan putaran kedua bervariasi, dari 20 persen sampai 30 persen. Sistem ini paling populer di negara – negara demokrasi presidensial.

4. *Sistem electoral Collage* Cara kerja sistem *Electoral Collage* adalah setiap daerah pemilihan (kecamatan, dan gabungan kecamatan untuk Bupati/Walikota; kabupaten/kota dan gabungan kabupaten/kota untuk gubernur) diberi alokasi atau popot suara dewan pemilih (*Electoral Collage*) sesuai dengan jumlah penduduk. Setelah pilkada, keseluruhan jumlah suara yang diperoleh tiap calon di setiap daerah pemilihan tersebut dihitung. Pemenang di setiap daerah pemilihan berhak memperoleh keseluruhan suara Dewan Pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan. Calon yang memperoleh suara dewan pemilih terbesar akan memenangkan pilkada langsung. Umumnya, calon yang berhasil memenangkan suara di daerah- daerah pemilihan dengan jumlah penduduk padat terpilih menjadi kepala daerah.

2.5 Kerangka Pemikiran

Menurut Murti Sumarni (2014:129) “Kerangka Pemikiran mempertautkan variabel-variabel yang akan diteliti, yaitu hubungan antara variabel bebas dengan variabel tergantug serta variabel yang lain,mungkin akan terlihat dalam penelitian. Jadi, kerangka pemikiran akan muncul apabila suatu penelitian mempertautkan dua variabel atau lebih.

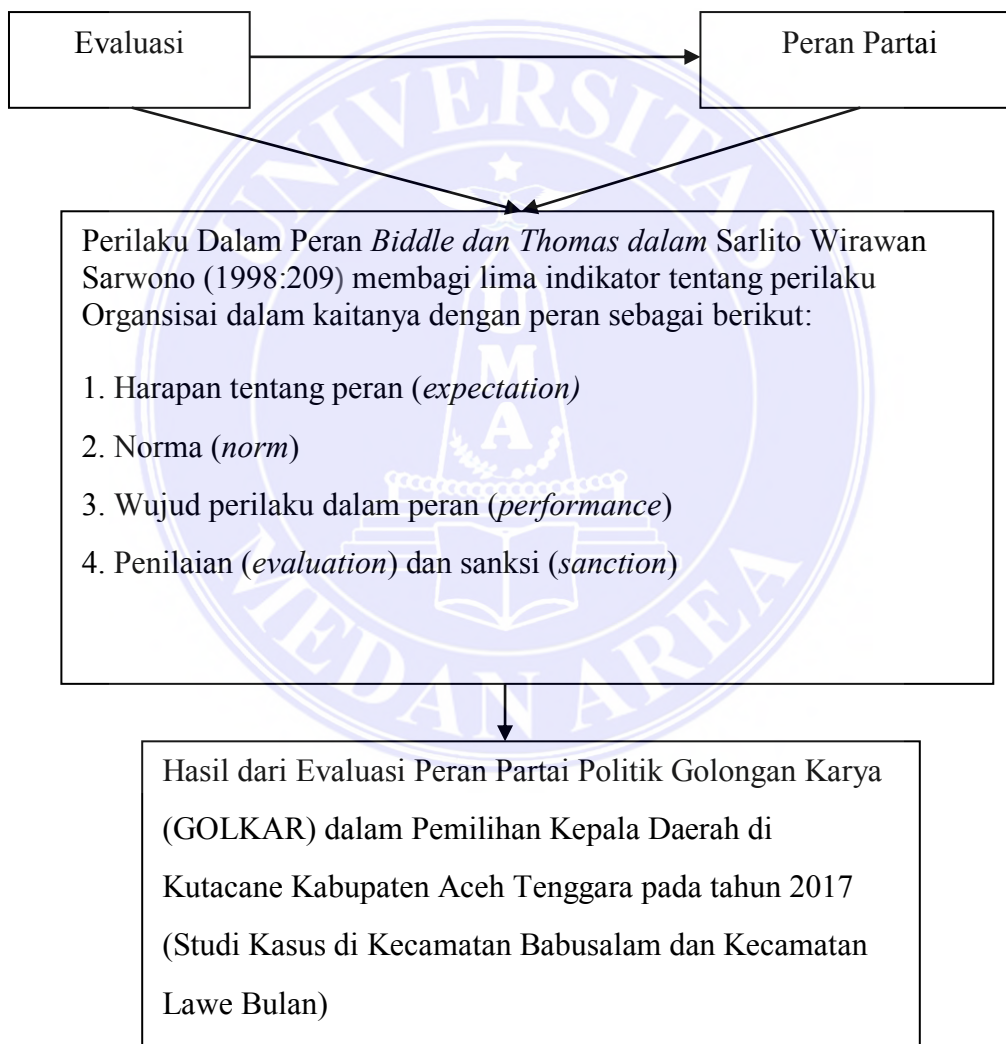
Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) adalah agenda lima tahunan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di berbagai daerah di Indonesia dari tingkat kabupaten/kota dan provinsi, kepala pemerintahan dipilih langsung oleh rakyat. Dalam konteks ini, akan membahas pilkada dalam tingkat kabupaten. Spesifiknya adalah di Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh pada tahun 2017. Bagaimana fenomena dan dinamika politik yang terjadi dalam pemilihan umum bupati dan wakil bupati di daerah tersebut. Dibahas juga mengenai bagaimana cara Partai Golongan Karya (GOLKAR) untuk mengoptimalkan cara-cara dalam menghadapi pertarungan pilkada di Kutacane.

Evaluasi Peran Partai Politik Golongan Karya (GOLKAR) dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara pada tahun 2017 (Studi Kasus di Kecamatan Babusalam dan Kecamatan Lawe Bulan), sangat vital bagi berlangsungnya Pemilihan Kepala Daerah di kutacane Kabupaten Aceh Tenggara, yang mana Partai Golongan Karya (GOLKAR) mengusung Pasangan H.Ali Basrah, S.Pd, MM dan Denny Febrian Roza, S.STP.

Yang mana dengan melihat visi dan misi yang diajukan oleh pasangan tersebut membuat Partai Golongan Karya (GOLKAR) kutacane Kabupaten Aceh Tenggara membantu dalam hal mensosialisasikan visi dan misi pasangan tersebut adalah Membawa masyarakat Aceh Tenggara lebih sejahtera dan bermartabat serta memiliki daya saing guna melanjutkan pembangunan yang berkelanjutan dan tujuh program unggulan yakni bidang pemberdayaan Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, Kualitas Keagamaan, Bidang infrastruktur serta Bidang penegakan Syariat Islam dan terakhir program bantuan bagi kaum dhuafa,

agar pemuda dan masyarakat dapat memahami maksud dan tujuan pasangan tersebut.

Kerangka pemikiran Evaluasi Peran Partai Politik Golongan Karya (GOLKAR) dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara pada tahun 2017 (Studi di Kecamatan Babusalam dan Kecamatan Lawe Bulan), dapat ditunjukkan sebagai berikut:



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

2.6 Penelitian Relevan

Ada pun penelitian yang relevan peneliti mengutip dari penelitian Arief Zaafril Razaqtar dalam skripsinya yang berjudul PERAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH (Studi Upaya Partai Golkar dalam Memenangkan Pasangan Calon Juliyatmono -Rohadi di Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013)”

Hasil penelitian Arief Zaafril Razaqtar dalam meneliti PERAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH (Studi Upaya Partai Golkar dalam Memenangkan Pasangan Calon Juliyatmono -Rohadi di Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013) adalah sebagai berikut:

Berdasarkan hasil analisis atas data hasil penelitian, diperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

Peran partai dalam menjalankan mesin partai dan membangun koalisi dengan partai lain sehingga dapat memenangkan kontestasi dalam Pilkada Kabupaten Karanganyar Tahun 2013. Partai berkewajiban untuk mencetak kader yang berkualitas, karena nanti kader inilah yang akan menjadi pemimpin bagi semua orang dan elemen masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi kepustakaan. Penentuan informan dilakukan secara *purposive* (menguasai fenomena yang ada). Data diolah dan dianalisis sesuai tahapan penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori strategi politik, yang akan menjelaskan tentang bagaimana strategi partai sebagai organisasi

politik mempunyai peran untuk merebut atau mendapatkan kekuasaan dalam memenangkan pemilihan kepala daerah.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa peran partai politik dalam menentukan kader terbaiknya untuk menduduki posisi pengambil kebijakan (*policy maker*) adalah hal yang wajib dilakukan guna memenangkan kontestasi pemilihan kepala daerah. Partai berkewajiban untuk mencetak kader terbaiknya yang akan menduduki jabatan elit pengambil kebijakan. Kader yang militan, akan mempunyai daya tarik untuk bergabungnya koalisi partai lain. Hal ini yang harus dilakukan oleh partai politik dalam menghadapi pemilihan kepala daerah. Kader-kader terbaik ini kemudian akan memberikan dampak positif, seperti misal akan meyakinkan bergabungnya koalisi partai lain yang mempercayakan dukungannya dan juga menambah keyakinan anggota partai lain dalam mendukung kemenangan calon pasangan tersebut. UU pilkada langsung sebagai pembuktian bahwa lahirnya sosok figur atau tokoh yang dipilih oleh masyarakat menjadi hal yang sangat penting saat ini. Orientasi masyarakat sekarang adalah memilih figur atau pasangan calon dalam pilkada bukan memilih partai politik semata.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Moleong (2007: 6) yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain.

Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif, menurut Bungin (2013: 33) pengertian tentang jenis penelitian berupa deskriptif kualitatif adalah suatu penelitian sosial yang sekedar untuk melukiskan atau menggambarkan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang teliti tanpa mempersoalkan hubungan antar variabel, penelitian kualitatif berusaha menampilkan secara holistic (utuh) yang membutuhkan kecermatan dalam pengamatan sehingga kita dapat memahami secara menyeluruh hasil penelitian.

Di samping itu, dalam penelitian kualitatif ini peneliti harus terjun langsung ke lapangan melakukan wawancara dan observasi guna memperoleh data yang peneliti butuhkan. Penelitian ini berusaha untuk menggambarkan dan mengklarifikasikan fakta atau karakteristik fenomena yang ada secara faktual, cermat, tidak mengandalkan bukti logika matematis, prinsip angka atau metode statistik sehingga dapat digambarkan kondisi dan keadaan yang sebenar-benarnya dengan isyarat atau tindakan sosial.

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di *Brothers cafe* yang beralamat Jl. H. Zainul Arifin No. 16-D Mandiri Building Lt I, Medan. Letaknya yang strategis, di Mandiri *Building*, menjadikan cafe ini ramai dikunjungi anak muda. Adapun waktu penelitian dilaksanakan pada Februari sampai dengan Maret 2017.

3.3. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.3.1. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

- a. Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugasnya) dari sumber pertamanya, yaitu melakukan wawancara dengan Manajer *Brothers cafe* dan karyawan, dan ditambahkan dengan beberapa pengunjung ataupun pelanggan yang datang mengunjungi *Brothers cafe*.
- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Data sekunder diperoleh peneliti dari beberapa literature seperti buku-buku yang bersangkutan dengan masalah penelitian, jurnal pendukung, dan data-data sebagai pelengkap dalam membahas masalah penelitian.

3.3.2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data disini berarti pencarian sumber-sumber, penentuan akses ke sumber-sumber dan akhirnya mempelajari dan mengumpulkan informasi (Birowo, 2004: 26). Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam suatu penelitian. Metode pengumpulan data merupakan bagian *instrumen* pengumpulan data yang sangat menentukan keberhasilan atau tidaknya suatu penelitian.

- a. Metode wawancara mendalam merupakan cara pengumpulan data melalui tanya jawab secara langsung kepada informan. Dalam penelitian ini, metode wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi secara langsung dari Manajer dan Karyawan *Brothers cafe* dan beberapa informan tambahan Pengunjung.
- b. Dokumentasi adalah metode pengumpulan bukti-bukti dan keterangan serta data-data objektif yang terjadi di lapangan. Hal ini bertujuan untuk memperkuat dan melengkapi data yang diperoleh melalui observasi dan interview. Dokumentasi yang digunakan berupa foto pengamatan mengenai pengunjung *Brothers cafe*.
- c. Metode Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung pada objek penelitian. Metode observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengamati secara visual sehingga validasi sangat bergantung kepada kemampuan observer. Sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.

3.4. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian menurut Arikunto (2006: 149) merupakan alat bantu bagi peneliti dalam mengumpulkan data. Alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis, sehingga mudah diolah.

Dalam hal ini instrumen penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah instrumen pokok dan instrumen penunjang. Instrumen pokok adalah manusia itu sendiri sedangkan instrumen penunjang adalah pedoman observasi dan pedoman wawancara. Menurut Moleong (2007: 168), instrumen dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Instrumen pokok dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Peneliti sebagai instrumen dapat berhubungan langsung dengan responden dan mampu memahami serta menilai berbagai bentuk dari interaksi di lapangan. Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif adalah ia sekaligus merupakan perencana, pelaksana, pengumpulan data, analisis, penafsir data, pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya.
2. Instrumen kedua dalam penelitian ini adalah dengan metode wawancara.
Adapun informan dalam penelitian adalah:
 - a. Informan kunci pada penelitian ini adalah Owner *Brothers cafe*.
 - b. Informan utama adalah Pegawai *Brothers cafe*.
 - c. Informan tambahan adalah Pengunjung *Brothers cafe*.

3.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengacu pada konsep Milles & Huberman dalam Moleong, (2007: 248) yaitu *interactive* model yang mengklasifikasikan analisis data dalam tiga langkah, yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data yaitu suatu proses pemahan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan data tertulis di lapangan. Dalam penelitian ini peneliti melakukan hasil wawancara yang dapat dipilah kembali dan difokuskan sesuai pada masalah penelitian.

2. Penyajian Data (*Display Data*)

Data ini tersusun sedemikian rupa sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan adapun bentuk yang lazim digunakan pada data kualitatif terdahulu adalah dalam bentuk teks naratif. Dalam penelitian ini hasil wawancara yang di dapat di lapangan disajikan dan dinarasikan untuk mempermudah peneliti.

3. Penarikan Kesimpulan (*Verifikasi*)

Dalam penelitian ini akan diungkap mengenai makna dari data yang dikumpulkan. Dari data tersebut akan diperoleh kesimpulan yang tentatif, kabur, kaku, dan meragukan, sehingga kesimpulan tersebut perlu diverifikasi. Dalam penelitian ini setelah data disajikan dalam bentuk narasi ditarik kesimpulan untuk melihat simpulan dari penelitian.

3.6. Pengujian Kredibilitas Data

Setiap penelitian harus memiliki kredibilitas sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Kredibilitas penelitian kualitatif adalah keberhasilan mencapai maksud mengeksplorasi masalah yang majemuk atau keterpercayaan terhadap hasil data penelitian.

Menurut (Moleong, 2007: 86), upaya untuk menjaga kredibilitas dalam penelitian adalah melalui langkah-langkah sebagai berikut:

a. Perpanjangan pengamatan

Suatu penelitian dengan meningkatkan ketekunan, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang ditemukan itu salah atau tidak sehingga dapat memberikan data yang akurat tentang apa yang diamati. Untuk meningkatkan ketekunan peneliti membaca berbagai referensi literature terkait dengan penelitian. Dengan membaca literature ini, maka wawasan peneliti akan semakin luas dan tajam sehingga dapat digunakan untuk memeriksa data yang ditemukan itu dapat dipercaya atau tidak.

b. Meningkatkan ketekunan

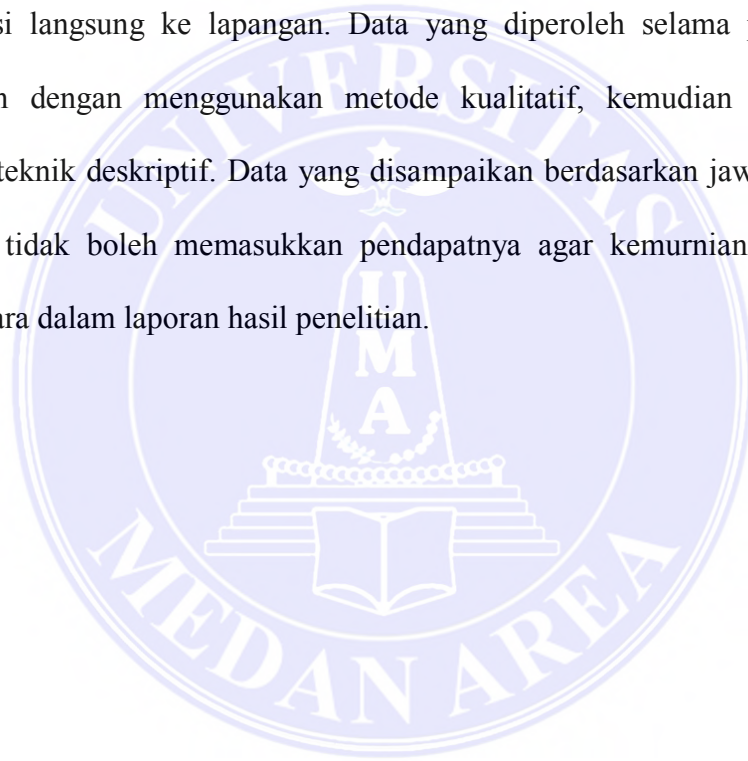
Melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan meningkatkan ketekunan. Peneliti akan melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan salah atau tidak, dengan cara membedakan hasil jawaban tiap informan, dengan melakukan pengecekan data hasil wawancara.

c. Triangulasi

Peneliti melakukan pengecekan kembali baik dari hasil wawancara dan observasi agar tidak terjadi kesalahan dalam penulisan. Triangulasi yang digunakan dalam

penelitian ini adalah dengan cara mencocokkan data hasil wawancara dan observasi terhadap informan utama dengan informan pendukung pengunjung *Brothers cafe*. Hal ini dilakukan untuk menguatkan hasil penelitian serta meyakinkan peneliti bahwa data dan fakta yang terjadi tidak keliru dan dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk memperoleh data yang objektif mengenai strategi pemasaran *Brothers cafe* membangun *Brand image*, peneliti telah melakukan wawancara dan observasi langsung ke lapangan. Data yang diperoleh selama penelitian akan disajikan dengan menggunakan metode kualitatif, kemudian data dianalisis dengan teknik deskriptif. Data yang disampaikan berdasarkan jawaban informan, peneliti tidak boleh memasukkan pendapatnya agar kemurnian jawaban tetap terpelihara dalam laporan hasil penelitian.



BAB V

KESIMPULAN

Sesuai dengan tujuan dari penelitian ini seperti yang tertulis di Bab I, yaitu untuk Mengetahui Bagaimana Evaluasi Peran Partai Politik Golongan Karya (GOLKAR) dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara pada tahun 2017 (Studi di Kecamatan Babusalam dan Kecamatan Lawe Bulan).

Dalam Penelitian yang penulis lakukan berjudul “Evaluasi Peran Partai Politik Golongan Karya (GOLKAR) dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara pada tahun 2017 (Studi di Kecamatan Babusalam dan Kecamatan Lawe Bulan)?”, setelah diadakan wawancara, penyajian dan analisa data, maka penulis dapat menarik kesimpulan dan saran.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data sebelumnya, secara umum Evaluasi Peran Partai Politik Golongan Karya (GOLKAR) dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara pada tahun 2017 (Studi di Kecamatan Babusalam dan Kecamatan Lawe Bulan) Tidak mencapai Harapan yang di buat dilihat dari hasil evaluasi yang menggunakan Teori Perilaku Dalam Peran menurut *Biddle dan Thomas dalam Sarlito Wirawan Sarwono (1998:209)* membagi lima indikator tentang perilaku Organisasi dalam kaitan nya dengan peran sebagai berikut sebagai berikut:

1. Harapan tentang peran (*expectation*)
2. Norma (*norm*)
3. Wujud perilaku dalam peran (*performance*)
4. Penilaian (*evaluation*) dan sanksi (*sanction*)

Dimana keempat indikator tersebut telah direncanakan dengan baik akan tetapi, semuanya tidak berjalan dan tidak sesuai dengan yang disepakati bersama, dengan kata lain Evaluasi Peran Partai Politik Golongan Karya (GOLKAR) dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara pada tahun 2017 (Studi di Kecamatan Babusalam dan Kecamatan Lawe Bulan) tidak berjalan sesuai Prosedur yang disepakati karena pasangan yang diusung Partai GOLKAR kalah dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

5.2 Saran

Guna lebih mengetahui Evaluasi Peran Partai Politik Golongan Karya (GOLKAR) dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara pada tahun 2017 (Studi di Kecamatan Babusalam dan Kecamatan Lawe Bulan) dapat dilakukan beberapa saran sebagai berikut:

1. menindak tegas dan memberi sanksi Kader yang menyalahgunakan wewenang agar kejadian yang tidak diinginkan tidak terulang lagi
2. Peningkatan sosialisasi, monitoring serta kontrol secara rutin untuk mengevaluasi dari hasil sebelum agar menjadi lebih baik kedepan.

3. Memiliki lebih dari satu *planing* agar dapat meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan



DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku-Buku:

A.Rahman H.I, 2007, Sistem Politik Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta

Aminudin, Muhammad. 2007. *Evaluasi Rencana Lokasi Pemindahan Terminal Induk Km. 6 Banjarmasin*. (Tesis). Yogyakarta: MPKD Universitas Gadjah Mada.

Agus Pramusinto, 2004, Otonomi Daerah dan Pemilihan Kepala Daerah dalam mencermati Hasil Pemilu 2004, Jakarta (Jakarta: Jurnal Analisis CSIS Vol. 33, No 2 Juni 2004)

Arbi Sanit, Perwakilan Politik di Indoensia, (Jakarta: , 1985)

Bryan, Carolie dan Louis G. White., 1987. Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang. LP3ES. Jakarta.

Charles O. Jones dalam Aprilia (2009). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Media Press, 2005

Ernest R. Alexander dalam Aminudin (2007), metode evaluasi. PT. Rajagrafindo Persada: Jakarta

Berry, David. (2003). Pokok-pokok Pikiran dalam Sosiologi. Jakarta: Raja. Grafindo

Dharma, Surya. 2004. Manajemen Kinerja, Falsafah, Teori dan Penerapannya. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi, (Bandung: PT. Rosdakarya, 2011)

DwiyantoAgus (2006) ,Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik Indikator Kinerja Pegawai.. PT. Rajagrafindo Persada: Jakarta

Ilyas Yaslis. 2005. Kinerja, Teori dan Penelitian. Liberty: Yogyakarta.

Joko J. Prihatmoko, 2005, Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Yogyakarta Penerbit Pustaka Pelajar

Luki Sandra Amalia, Syamsuddin Haris, Sri nur yanti, Lili Romli, Devi Darmawan, 2016, Evalueasi Pemilu Legislatif 2014 : Analisi Proses dan Hasil, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Mangkunegara, Anwar Prabu. 2005. Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan, Cetakan keenam. Remaja Rosda Karya: Bandung.

Miriam Budiardjo, 2013, Dasar – Dasar Ilmu Politik, Prima Grafika, Jakarta

Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif* (Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru). Jakarta: UIP.

Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif* (Buku Sumber tentang Metode-metode Baru). Jakarta: UIP.

Mintzberg dalam buku Pengantar Manajemen Dan buku Kepemimpinan Dalam Manajemen yang di tulis oleh Siswanto dan Miftah Thoha (2012), Yogyakarta

Moleong, Lexy J. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Murti Sumarni. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: PT. Liberty

Moch. Solekhan, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, (Malang: Setara Press, 2014)

Muhammad Asfar, 2006, Pemilu dan Perilaku Memilih 1955-2004, Pusat Study Demokrasi dan HAM (PusDeHAM), Surabaya

Nimmo Tahun : Cetakan ke-1 s.d. 4, tahun 1989 s.d. 2006 Komunikasi Politik, Khalayak dan Efek.

Peter Salim dan Yeni Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, (Jakarta: Modern English Press, 199)

Petty William Keown, Arthur J., David F. Scott, Jr., John D. Martin. 1996. *Basic Financial Management*, 7th ed. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.

Ralph Linton, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Rajawali, 1984)

Ramlan Surbakti, 2008, Sistem pemilu dan tatanan politik demokrasi, dalam ramlan surbakti, dkk (Ed.), Perekayasaan Sistem Pemilu untuk Pembangunan tata politik demokratis, Kemitraan Jakarta

Richard E. Petty dan John T. Cacioppo dalam bukunya *Attitudes and Persuasion: Classic and Contemporary Approaches* , 1994, English

Rivai, Veithzal. 2005. Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan, Dari Teori Ke Praktek. PT. Rajagrafindo Persada: Jakarta.

Sarlito Wirawan Sarwono, Teori- Teori Psikologi Sosial, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)

Saparuddin . 2007. Teori supervisi kepemimpinan pada buku yang diterbitkan

Scriven, M. (1991). *Evaluation thesaurus* (4th ed.). Newbury Park, CA: Sage.

Sendow. 2007. Pengukuran Kinerja Karyawan. Gunung Agung: Jakarta.

Simamora, Hendry. 2004. Manajemen Sumber Daya Manusia. STIE.YKPN: Jogjakarta.

Siswanto dan Miftah Thoha, 2012 Pengantar Manajemen Dan buku Kepemimpinan Dalam Manajemen , Pustaka Pelajar Yogyakarta

Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Administratif*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Administratif*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sutrisno, Hadi. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia. Andi Offset: Yogyakarta

Soerjono Soekanto, 2012 Memperkenalkan Sosiologi, (Jakarta: Rajawali)

Suhardono, Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya), (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994)

Teddy Mulyana, Cultures and communication an Indonesian scholar's perspective, (Bandung: Remaja Rosdakrya, 2012)

Sumber Jurnal Penelitian:

Agus Hadiawan, 2009, Evaluasi Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Provinsi Lampung (Studi di Kabupaten Lampung Selatan, Kota Metro dan Kota BandarLampung), Bandar Lampung, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan Universitas Lampung

Agus Pramusinto, 2004, Otonomi Daerah dan Pemilihan Kepala Daerah dalam mencermati Hasil Pemilu 2004, Jakarta (Jakarta: Jurnal Analisis CSIS Vol. 33, No 2 Juni 2004)

Arief Zaafril Razaqtar, 2013, PERAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH (Studi Upaya Partai Golkar dalam Memenangkan Pasangan Calon Juliyatmono -Rohadi di Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013)

Sumber Undang-Undang:

Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang evaluasi kinerja

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Kepala Daerah adalah Kepala Pemerintah Daerah yang dipilih secara demokratis

Dalam pasal 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 menjelaskan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang Undang No 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Lampiran



Foto Bersama Bapak Ketua Partai Golkar, Sekretaris beserta Para Kader dan Warga

Di Sekretariat Partai Golkar Aceh Tenggara

13 Desember 2018



Foto Bersama Ketua Partai Golongan Karya Kabupaten Aceh Tenggara
Di Sekretariat Partai GOLKAR Aceh Tenggara
13 Desember 2018

Daftar Pertanyaan Informan:

Perilaku Dalam Peran *Biddle dan Thomas dalam Sarlito Wirawan Sarwono* (1998:209) membagi lima indikator tentang perilaku Organisasi dalam kaitannya dengan peran sebagai berikut:

1. Harapan tentang peran (*expectation*)

Pertanyaan:

- Selama berlangsungnya PILKADA 2017 yang lalu, harapan awal dari pihak pengusung calon nomor urut 1 itu seperti apa ya pak?
- apakah harapan itu tercapai atau bahkan jauh dari apa yang diharapkan berbagai pihak pengusung calon tersebut?
- bagaimana cara untuk menyatukan harapan agar semua satu pemikiran dan satu visi misi (dalam konteks berbeda partai)
- setelah mengetahui harapan ini tercapai atau tidaknya, adakah langkah langkah lain yang sudah disiapkan?
- Adakah perbedaan harapan antara sesama kubu pendukung paslon nomer urut 1 ini?

2. Norma (*norm*)

Pertanyaan:

- adakah kader-kader yang Membantah dari apa yang direncanakan, sehingga hal seperti ini terjadi (kalah dalam PILKADA)?
- bagaimana pihak partai menanggapi hal ini? (kalah dalam PILKADA) adakah sanksi yang akan diberikan?
- apakah partai politik menghalalkan segala cara dalam memenangkan paslon nya?

3. Wujud perilaku dalam peran (*performance*)

- peran apa saja yang dilakukan oleh partai pendukung pasangan calon nomer 1 dalam proses kemenangan PILKADA 2017 yang lalu?
- Berapa partai politik yang berkoalisi dalam kubu pasangan calon nomer 1 dan 2 ?

- strategi apa saja yang dilakukan partai politik dan pasang calon agar mendapat suara dari masyarakat disini?

- adakah upaya upaya pendekatan terhadap masyarakat untuk mendapatkan suara yang banyak? Apa saja kah itu?

4. Penilaian (*evaluation*) dan

- adakah evaluasi yang dilakukan setelah pasangan nomer urut 1 ini mengalami kekalahan dalam PILKADA 2017 yang lalu?

- Apa planning yang akan dilakukan di PILKADA yang akan datang?,memakai cara lama atau ada hal baru yang akan menjadi senjata ampuh bagi kubu ini?

- setelah dievaluasi adakah ditemukan beberapa atau bahkan banyak kader yang membelok dari pilihan awal yang telah ditentukan bersama?(mustahil paslon yang didukung prta partai besar bisa kalah oleh paslon yang didukung 1 partai politik)

5. sanksi (*sanction*)

- adakah sanksi terhadap kader yang terbukti membelok kekubu lawan?

-sanksi apa yang diberikan partai terhadap kader yang seperti itu?